

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses problematisasi dalam pembentukan BUMDes untuk mengubah teknis pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat, terutama pedagang. Kebijakan pembentukan BUMDes dianggap lebih menguntungkan pemerintah desa daripada masyarakat luas. Efektifitas dan efisiensi yang menjadi rasionalisasi alasan perubahan teknis pengelolaan pasar pada faktanya tidak terwujud. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini lebih didorong oleh kepentingan pribadi pihak tertentu, khususnya kepala desa.

Proses pengisian jabatan dan pengambilan keputusan di BUMDes sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan lokal. Meskipun secara formal proses seleksi jabatan diklaim terbuka dan transparan, kenyataannya jabatan-jabatan penting di BUMDes sudah ditentukan oleh pemerintah desa dengan mengedepankan kepentingan politik dan upaya untuk mempertahankan kekuasaan daripada partisipasi masyarakat. Rusmana, sebagai kepala desa, berhasil menggunakan BUMDes sebagai alat untuk memperkuat posisinya dan menetralkan lawan-lawan politiknya. Dengan memberikan jabatan di BUMDes kepada mantan lawan politik. Hal ini menunjukkan dominasi elit lokal. Rusmana tidak hanya menjaga stabilitas pemerintahan tetapi juga mengurangi potensi ancaman terhadap kekuasaannya.

Melalui pendekatan WPR, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut direpresentasikan, asumsi yang mendasari kebijakan, serta

dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kesimpulan ini diuraikan melalui analisis beberapa indikator kunci, yang meliputi representasi masalah kebijakan, prasangka dan asumsi yang mendasarinya, proses terbentuknya masalah, perspektif alternatif, serta efek yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri sebenarnya lebih mewakili kepentingan elit lokal daripada murni upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya, menggunakan kebijakan ini untuk memperkuat kekuasaan politik mereka. Pembangunan BUMDes yang awalnya ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan pasar dan mengoptimalkan aset desa ternyata berujung pada ketidakadilan sosial bagi pedagang pasar. Proses relokasi dan kenaikan harga sewa kios dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang. Hal ini menandakan bahwa kebijakan ini lebih condong pada kepentingan pihak penguasa daripada masyarakat umum. Prasangka dan asumsi yang mendasarinya bahwa pengelolaan pasar desa sebelumnya tidak efisien dan perlu dibenahi melalui pembentukan BUMDes. Kebijakan ini diasumsikan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar melalui relokasi pedagang dan kenaikan harga sewa. Namun, asumsi ini diabaikan oleh realitas di lapangan di mana para pedagang merasa hak-hak mereka terabaikan dan keberatan dengan keputusan pemerintah desa. Asumsi bahwa masalah hanya bisa diselesaikan melalui relokasi dan kenaikan harga menjadi bias, karena tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap pedagang kecil yang menjadi ujung tombak ekonomi desa. Proses terbentuknya masalah dari representasi ini terwujud karena adanya

ketidaksesuaian antara prosedur resmi dengan praktik di lapangan. Meskipun pemerintah desa menyatakan bahwa musyawarah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pedagang, kenyataannya banyak dari mereka yang merasa bahwa musyawarah tersebut hanya formalitas. Tidak ada dialog nyata yang melibatkan kepentingan pedagang, dan keputusan relokasi serta kenaikan harga kios ditetapkan tanpa adanya negosiasi yang berarti. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih fokus pada pencapaian tujuan politik dan ekonominya daripada memperhatikan kesejahteraan Masyarakat. Masalah ini bisa disikapi dengan alternatif yang lebih inklusif, yaitu melalui renovasi pasar daripada relokasi total. Renovasi memungkinkan perbaikan infrastruktur pasar tanpa membebani pedagang dengan biaya sewa baru yang lebih tinggi. Selain itu, renovasi memberikan waktu bagi pedagang untuk beradaptasi tanpa harus menghadapi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh relokasi. Dengan cara ini, kesejahteraan pedagang bisa lebih diperhatikan, dan kebutuhan modernisasi pasar tetap bisa terpenuhi. Efek yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yang sangat dirasakan oleh pedagang. Banyak pedagang yang mengalami penurunan pendapatan karena harus membayar sewa yang lebih tinggi, sementara jumlah pembeli tidak bertambah seiring dengan relokasi. Selain itu, ketidakmampuan pedagang untuk beradaptasi dengan harga sewa yang baru menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi pedagang kecil, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan asli desa (PADes) dari pasar itu sendiri. Kebijakan ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di antara pedagang.

Ketidaksesuaian antara praktik normatif dengan realita di lapangan memicu resistensi dari para pedagang, walaupun pada akhirnya suara mereka tetap tidak diakomodir dengan alasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembentukan BUMDes di Desa Cipeundeuy bukan hanya tentang upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan desa, tetapi juga tentang dinamika kekuasaan lokal yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Proses pengisian jabatan di BUMDes lebih merefleksikan kepentingan elit lokal daripada partisipasi demokratis, dengan kepala desa memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengkonsolidasikan dukungan dan menjaga stabilitas kekuasaannya.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan *What's the Problem Represented to be?* sebagai kerangka analisis, namun penggunaannya dibatasi hanya pada penerapan enam indikator yang menjadi inti dalam proses problematisasi masalah. Meskipun keenam indikator ini dipakai untuk menelaah kasus yang diteliti, analisis yang dihasilkan tidak terlalu mendalam pada setiap indikator. Hal ini disebabkan oleh fokus penelitian yang lebih terbatas, sehingga meskipun WPR Approach digunakan, eksplorasi dan pendalaman pada tiap aspeknya belum mencapai tingkat yang komprehensif. Akibatnya, pemahaman yang ditawarkan terkait masalah dalam studi kasus ini masih bersifat umum dan belum menggali secara terperinci setiap bagian dari kerangka WPR tersebut.

4.2 Saran

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri di Desa Cipeundeuy, beberapa langkah perbaikan perlu diterapkan. Pertama, penting untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat guna memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat terakomodasi. Selain itu, proses pengisian jabatan di BUMDes perlu dilakukan dengan transparan dan adil, dengan memastikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama dan menghindari pengaruh kepentingan politik lokal. Pengawasan independen dan keterlibatan masyarakat dalam seleksi jabatan dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Selanjutnya, kebijakan terkait relokasi pasar dan peningkatan harga sewa kios harus dipertimbangkan secara hati-hati, dengan melakukan studi dampak ekonomi untuk memahami efeknya terhadap pedagang. Jika relokasi diperlukan, pemerintah desa sebaiknya memberikan dukungan seperti subsidi atau bantuan untuk mengurangi beban ekonomi pedagang, serta mempertimbangkan opsi yang lebih menguntungkan bagi mereka. Untuk menyelesaikan ketidakpuasan dan konflik, pemerintah desa perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, seperti forum pengaduan atau mediasi, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi yang adil.